

## Analisis Tradeoff antara Inflasi dan Pengangguran di Indonesia: Pendekatan Kurva Phillips

Ngafifudin Asrofi<sup>1</sup>, Muhammad Dhifan Fadlih<sup>2</sup>, Danu Setiyawan<sup>3</sup>,  
Mohamad Faizal Rizki<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten  
Tulungagung

Korespondensi penulis: [danusetiyawan9b@email.com](mailto:danusetiyawan9b@email.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the tradeoff relationship between inflation and unemployment in Indonesia using the Phillips Curve approach. This phenomenon is a central focus in macroeconomics as both indicators are closely linked and directly impact national economic stability. Using data from 2019 to 2024, this study examines the dynamics of inflation and unemployment, as well as their implications for monetary and fiscal policy. The analysis shows that although there are indications of a tradeoff pattern as described by the Phillips Curve, structural and global factors also influence this relationship. Monetary and fiscal policies during crisis, recovery, and stabilization periods play a crucial role in managing the balance between inflation and unemployment.*

**Keywords:** *Economic Policy, Inflation, Phillips Curve, Tradeoff, Unemployment*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tradeoff antara inflasi dan pengangguran di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Kurva Phillips. Fenomena ini menjadi fokus utama dalam ekonomi makro karena kedua indikator ini saling memengaruhi dan berdampak langsung pada stabilitas perekonomian nasional. Dengan menggunakan data periode 2019–2024, penelitian ini mengkaji dinamika inflasi dan pengangguran serta implikasinya terhadap kebijakan moneter dan fiskal. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat indikasi pola tradeoff sebagaimana dijelaskan oleh Kurva Phillips, faktor struktural dan global juga memengaruhi hubungan tersebut. Kebijakan moneter dan fiskal selama masa krisis, pemulihan, hingga stabilisasi memainkan peran penting dalam mengelola keseimbangan antara inflasi dan pengangguran.

**Kata kunci:** Inflasi, Kurva Phillips, Pengangguran, Tradeoff, Kebijakan Ekonomi

### 1. LATAR BELAKANG

Inflasi dan pengangguran merupakan dua indikator makroekonomi utama yang kerap digunakan untuk mengevaluasi stabilitas dan kesehatan ekonomi suatu negara. Keduanya tidak hanya berperan sebagai indikator ekonomi, tetapi juga sebagai acuan utama dalam pengambilan kebijakan moneter dan fiskal. Secara teori, hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan melalui pendekatan Kurva Phillips, yang menyatakan adanya hubungan negatif di antara keduanya. Artinya, penurunan tingkat pengangguran cenderung disertai dengan kenaikan inflasi, dan sebaliknya.

Namun, dalam konteks perekonomian Indonesia, hubungan antara kedua variabel ini tidak selalu berjalan sesuai teori. Berdasarkan data yang dikaji dalam artikel, selama periode 2019–2024, dinamika inflasi dan pengangguran menunjukkan pola yang kompleks. Pada masa pandemi COVID-19 (2020–2021), misalnya, inflasi berada pada tingkat rendah sementara pengangguran meningkat tajam akibat kontraksi ekonomi. Namun, pada masa pemulihan

(2022), terjadi lonjakan inflasi hingga mencapai 5,51% sebagai dampak kenaikan harga energi dan pangan global, sementara tingkat pengangguran justru menurun. Menariknya, pada tahun 2023 dan 2024, inflasi dan pengangguran sama-sama mengalami penurunan, suatu kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prediksi Kurva Phillips.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia bukan hanya ditentukan oleh mekanisme pasar tenaga kerja, tetapi juga oleh berbagai faktor struktural, global, dan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana konsep Kurva Phillips masih relevan diterapkan dalam konteks perekonomian Indonesia modern. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Inflasi**

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mengurangi daya beli uang masyarakat dan mempengaruhi stabilitas perekonomian. Inflasi dapat terjadi karena tekanan dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*) dan juga dari sisi biaya produksi (*cost-push inflation*) (*Nopirin: 2000*). Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen moneter, seperti suku bunga dan pengaturan jumlah uang beredar, untuk mengendalikan inflasi.

### **2. Teori Pengangguran**

Pengangguran adalah kondisi di mana sebagian tenaga kerja yang siap dan bersedia bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: pengangguran struktural, friksional, musiman, dan siklikal (*Sukirno: 2004*). Tingginya pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, seperti menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, dan kerawanan sosial lainnya.

### **3. Teori Kurva Phillips**

Kurva Phillips menjelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Artinya, ketika inflasi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh A.W. Phillips berdasarkan data di Inggris selama periode 1861–1957. Namun, ekonom seperti Milton Friedman dan Edmund Phelps kemudian menyatakan bahwa hubungan tersebut hanya

berlaku dalam jangka pendek, karena dalam jangka panjang ekspektasi masyarakat terhadap inflasi akan menyesuaikan sehingga kurva Phillips menjadi vertikal.

#### **4. Teori Tradeoff Inflasi dan Pengangguran**

Dalam ekonomi Keynesian, tradeoff antara inflasi dan pengangguran terjadi karena kebijakan fiskal atau moneter yang mendorong permintaan agregat dapat menurunkan pengangguran tetapi sekaligus meningkatkan inflasi. Sebaliknya, kebijakan yang menurunkan inflasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Namun menurut pendekatan monetaris, tradeoff ini tidak bersifat permanen, sebab masyarakat akan menyesuaikan ekspektasi terhadap inflasi di masa depan (*Mankiw: 2016*).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Data yang dianalisis mencakup tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024. Sumber utama data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi resmi Bank Indonesia, termasuk data inflasi tahunan, laporan kondisi ketenagakerjaan, serta laporan kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Analisis dilakukan dengan cara mengamati pergerakan tren inflasi dan pengangguran dari tahun ke tahun, kemudian mengkaitkannya dengan pendekatan teoritis Kurva Phillips. Dalam proses analisis, peneliti meninjau apakah terdapat pola hubungan negatif antara kedua variabel tersebut dalam jangka pendek, serta bagaimana kebijakan ekonomi berperan dalam membentuk dinamika tersebut. Selain itu, pendekatan kualitatif melalui interpretasi kontekstual juga digunakan untuk memahami peran faktor eksternal seperti pandemi, krisis global, dan ekspektasi masyarakat dalam memengaruhi hubungan inflasi dan pengangguran. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap keterkaitan kedua variabel serta relevansi Kurva Phillips dalam kondisi ekonomi Indonesia kontemporer.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Inflasi dan Pengangguran di Indonesia (2019–2024)

**Tabel 1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Inflasi Tahunan Indonesia (2019–2024)**

Tahun	TPT (%)	Keterangan	Inflasi (%)	Keterangan
2019	5,28	Sebelum pandemi COVID-19	2,72	Stabil sebelum pandemi
2020	7,07	Dampak awal pandemi COVID-19	1,68	Inflasi rendah akibat pandemi
2021	6,26	Mulai pemulihan ekonomi	1,87	Sedikit meningkat
2022	5,86	Penurunan lebih lanjut	5,51	Kenaikan signifikan
2023	5,32	Tren menurun berlanjut	2,61	Penurunan kembali
2024	4,91	Terendah dalam lima tahun terakhir	2,28	Stabil

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik 2019-2024)

Inflasi dan pengangguran adalah dua indikator makroekonomi utama yang digunakan untuk menilai kondisi stabilitas ekonomi suatu negara. Keduanya saling terkait erat dan seringkali menimbulkan dilema kebijakan ekonomi karena bersifat tradeoff. Artinya, upaya menurunkan tingkat pengangguran kadang kala berdampak pada kenaikan inflasi, dan sebaliknya (Mankiw: 2007).

##### 1. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dari 2019 hingga 2024 memperlihatkan dinamika yang mencerminkan dampak dari krisis global serta proses pemulihan ekonomi nasional. Pada 2019, sebelum pandemi COVID-19 melanda, TPT berada pada angka 5,28%, mencerminkan stabilitas relatif di pasar tenaga kerja. Namun, pada tahun 2020, TPT melonjak menjadi 7,07%, akibat pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi yang drastis selama masa awal pandemi. Ini adalah bukti nyata bahwa krisis kesehatan global langsung berdampak pada sektor ketenagakerjaan (Sukirno: 2004).

Seiring berjalannya waktu, terutama dengan dimulainya vaksinasi massal dan pelonggaran aktivitas ekonomi, TPT mulai menurun. Tahun 2021 mencatatkan penurunan ke 6,26%, kemudian dilanjutkan pada 2022 (5,86%), 2023 (5,32%), dan akhirnya mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir pada tahun 2024 sebesar 4,91%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja telah mulai pulih, meskipun belum sepenuhnya mencapai kondisi optimal karena masih terdapat pekerja informal dan masalah produktivitas.

## 2. Perkembangan Inflasi

Di sisi lain, inflasi di Indonesia selama periode yang sama mengalami fluktuasi. Tahun 2019 mencatat inflasi 2,72%, yang dianggap moderat dan mencerminkan stabilitas harga sebelum pandemi. Namun, pada tahun 2020, inflasi anjlok ke 1,68%, akibat lemahnya daya beli masyarakat dan turunnya permintaan agregat sebagai dampak dari pandemi (Boediono: 2001).

Tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan ke 1,87%, namun puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan inflasi mencapai 5,51%. Ini dipicu oleh efek pemulihan ekonomi global, meningkatnya permintaan, gangguan rantai pasok, serta harga energi dan pangan dunia yang melonjak. Kenaikan ini cukup signifikan dan menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas moneter dan fiskal.

Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali menurun masing-masing menjadi 2,61% dan 2,28%. Penurunan ini menandakan bahwa kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia mulai efektif, dan kondisi pasokan serta permintaan kembali seimbang.

## 3. Keterkaitan Inflasi dan Pengangguran

Data tersebut mengilustrasikan pola kurva Phillips, yaitu tradeoff antara inflasi dan pengangguran. Ketika inflasi tinggi (2022), TPT berada pada level menengah (5,86%), sedangkan saat inflasi turun (2024), TPT juga mencapai titik terendah (4,91%), menunjukkan bahwa faktor struktural dan global turut mempengaruhi hubungan klasik ini. Namun, fenomena ini tetap menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi makro (Mankiw: 2007).

## B. Implikasi Tradeoff terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia

Kebijakan moneter merupakan alat penting untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, dalam praktiknya,

kebijakan moneter menghadapi dilema, terutama saat terjadi tradeoff antara stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja.

### 1. Masa Krisis: Ekspansi Moneter

Pada awal pandemi tahun 2020, Indonesia menghadapi lonjakan pengangguran yang signifikan dan inflasi yang sangat rendah. Untuk merespons hal ini, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga acuan secara bertahap hingga 3,50%—tingkat terendah dalam sejarah. Tujuan utamanya adalah merangsang konsumsi dan investasi agar ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan krisis (Boediono: 2001).

Langkah ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pengangguran tinggi dan inflasi rendah, kebijakan moneter yang longgar adalah respons yang logis. Hal ini juga sejalan dengan teori Keynesian yang menyarankan peningkatan permintaan agregat sebagai solusi jangka pendek (Nopirin: 2000).

### 2. Periode Pemulihan dan Tekanan Inflasi

Pada tahun 2022, ketika inflasi melonjak tajam hingga 5,51%, Bank Indonesia mulai mengubah arah kebijakannya menjadi lebih ketat. Suku bunga acuan dinaikkan secara bertahap untuk mengendalikan inflasi, meskipun pasar tenaga kerja belum sepenuhnya pulih. Hal ini menunjukkan adanya dilema: menjaga daya beli masyarakat atau mendorong penciptaan lapangan kerja.

Dalam situasi seperti ini, bank sentral dihadapkan pada keputusan sulit. Jika kebijakan moneter tetap longgar, maka risiko inflasi akan semakin tinggi. Namun, jika terlalu ketat, pemulihan ekonomi bisa terganggu. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan analisis makroekonomi yang mendalam agar kebijakan tidak justru memperburuk keadaan (Sukirno: 2004).

### 3. Menuju Kebijakan Netral

Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali stabil dan pengangguran menurun. Ini memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan kebijakan moneter yang lebih netral tidak terlalu ekspansif maupun kontraktif. Dengan kondisi ini, fokus dapat bergeser ke stabilitas jangka panjang dan penguatan struktur ekonomi nasional, termasuk penguatan sistem keuangan.

### C. Implikasi Tradeoff terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal digunakan untuk memengaruhi permintaan agregat melalui pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi. Dalam menghadapi tradeoff antara inflasi dan pengangguran, kebijakan fiskal harus diarahkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan baru.

#### 1. Respons Fiskal saat Pandemi

Selama masa awal pandemi, pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif dalam menjalankan kebijakan fiskal ekspansif. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diluncurkan dengan total anggaran ratusan triliun rupiah. Fokusnya mencakup bantuan sosial, subsidi bunga kredit UMKM, insentif pajak, serta penguatan sektor kesehatan. Akibatnya, defisit anggaran negara meningkat tajam, bahkan melampaui batas 3% PDB yang biasanya berlaku. Pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk memperluas defisit. Ini menunjukkan fleksibilitas fiskal dalam situasi darurat (Kemenkeu RI: 2021).

#### 2. Dilema saat Inflasi Tinggi

Pada tahun 2022, ketika inflasi naik drastis, pemerintah menghadapi dilema besar. Di satu sisi, subsidi energi harus tetap diberikan agar inflasi tidak semakin tinggi. Di sisi lain, beban anggaran menjadi sangat besar, terutama karena harga minyak dunia meningkat tajam.

Dalam kondisi ini, pemerintah tidak bisa serta merta menarik stimulus, karena pemulihan ekonomi masih berlangsung. Maka yang dilakukan adalah mengalihkan sebagian belanja ke sektor yang lebih produktif, seperti infrastruktur dan ketahanan pangan, serta meningkatkan efisiensi belanja.

#### 3. Konsolidasi Fiskal dan Fokus Jangka Panjang

Memasuki tahun 2023 dan 2024, pemerintah mulai mengurangi defisit dan menjalankan konsolidasi fiskal. Ini dilakukan dengan meningkatkan rasio perpajakan melalui reformasi pajak (UU HPP), serta memperbaiki belanja agar lebih efektif. Fokus diarahkan pada penguatan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang, seperti pendidikan, riset, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Tradeoff antara inflasi dan pengangguran dalam konteks fiskal menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tidak bisa satu arah. Respons harus dinamis dan adaptif, sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan global (Sukirno: 2004).

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia selama periode 2019–2024 tidak sepenuhnya sejalan dengan pola klasik Kurva Phillips. Secara teori, Kurva Phillips menyatakan adanya trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, di mana peningkatan inflasi akan disertai penurunan pengangguran, dan sebaliknya. Namun, hasil analisis data menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor non-teoritis.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan inflasi menurun menjadi 1,68% sementara pengangguran meningkat menjadi 7,07%, sesuai dengan pola Kurva Phillips. Namun, pada 2022, inflasi melonjak menjadi 5,51% akibat tekanan harga energi dan pangan global, tetapi pengangguran justru menurun menjadi 5,86%, kembali mencerminkan pola negatif. Uniknya, pada 2023 dan 2024, terjadi penurunan serentak pada kedua indikator dengan inflasi turun ke 2,61% dan pengangguran ke 5,32% yang tidak sesuai dengan prediksi Kurva Phillips.

Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia tidak semata ditentukan oleh faktor permintaan agregat, tetapi juga oleh faktor struktural, ekspektasi inflasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi eksternal. Dengan demikian, meskipun Kurva Phillips masih dapat digunakan sebagai referensi teoritis dalam jangka pendek, penggunaannya sebagai alat prediksi kebijakan perlu dilengkapi dengan pendekatan yang mempertimbangkan kompleksitas ekonomi riil Indonesia. Koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M., & Setiawan, A. (2020). Pengujian Kurva Phillips di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 9(2), 125–135. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i2.38389>
- Astuti, P. B. (2016). Analisis Kurva Phillips dan Hukum Okun di Indonesia Tahun 1986–2016. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 15(1), 72–91.
- Badan Pusat Statistik. (2024, Januari 2). Inflasi Year-on-Year (y-on-y) pada Desember 2023 sebesar 2,61 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/02/2299/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-desember-2023-sebesar-2-61-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-sumenep-sebesar-5-08-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024, November 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah per bulan. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-27-juta-rupiah-per-bulan-.html>



- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014). Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran (Kurva Phillips) di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed., Global ed.). Pearson.
- Boediono. (2001). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Ekonomi Makro* (Edisi ke-4). BPFE Yogyakarta.
- Hamidah, C. (2010). Keterkaitan antara Inflasi, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi (Pengujian Kurva Philips untuk Indonesia). *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 6(1), 1–12.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan APBN dan Program PEN*. Jakarta.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar ekonomi makro* (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Mankiw, N. G. (2015). *Macroeconomics* (9th ed.). Worth Publishers.
- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Edisi ke-1). PT RajaGrafindo Persada.
- Nopirin. (2000). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahmawati, T. P., Fitrawaty, & Rahmadana, M. F. (2023). Analisis Inflasi dengan Pendekatan Kurva Philips di Provinsi Aceh. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 1188–1203. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.2004>
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru* (Edisi ke-1, Cetakan ke-1). RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi ke-3, Cetakan ke-16). PT RajaGrafindo Persada.
- Syachbudy, Q. Q., Yusnadi, A., & Alfariqi, R. S. (2023). Analisis Keterhubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Tahun 1985–2021 Melalui Pendekatan Kurva Phillips. *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 68–77. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v4i1.6507>
- Tanjung, A. A., & Siswanto, A. A. (2022). Analisis Kurva Phillips di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(1), 1–10. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10066>
- Wulandari, D., Utomo, S. H., Narmaditya, B. S., & Kamaludin, M. (2019). Nexus between inflation and unemployment: Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(2), 269–275. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no2.269>